

## **PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PENGENDALIAN INTERNAL DAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

**Andhini Maudy Ramadhani<sup>1</sup>; Nyimas Wardatul Afiqoh<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Gresik<sup>1,2</sup>

Email : andini.maudy11@gmail.com<sup>1</sup>; afiqohnyimas@umg.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan dari studi dimaksudkan dengan tujuan menganalisis keterkaitan sistem pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal, dan penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. Motivasi studi tersebut berfokus pada pentingnya memahami komponen-komponen yang berdampak pada kinerja pemerintah daerah, khususnya di provinsi Gresik. Dengan menganalisis dampak sistem pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal, dan implementasi sistem akuntansi pemerintah, riset ini bertujuan untuk memberikan acuan bagian pemerintah dalam meningkatkan kinerja mereka. Metode dan analisis kuantitatif yang diterapkan dalam eksplorasi ini melibatkan parameter yang mencakup analisis regresi linier berganda dan menggunakan teknik kuesioner terhadap pegawai di instansi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan uji kebenarannya menggunakan program IBM SPSS Statistic 16.

Kata kunci : Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengendalian Internal; Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah; Kinerja Pemerintah Daerah

### **ABSTRACT**

*The purpose of the research is intended with the aim of analyzing the linkage of the regional financial management system, internal control, and the application of government accounting systems to the performance of local governments. The motivation of the study focuses on the importance of understanding the components that have an impact in the performance of local governments, especially in Gresik Province. By analyzing the impact of the regional financial management system, internal control, and implementation of government accounting systems, this research aims to provide a reference for government section in improving their performance. Method and quantitative analysis applied in this exploration involves parameters that include multiple linear regression analysis and use questionnaire techniques for employees in local government agencies. This study uses the truth test using the IBM SPSS Statistic 16 program.*

*Keywords : Regional Financial Management System; Internal Control; Implementation of the Government Accounting System; and Regional Government Performance*

### **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 perihal Pembagian Keuangan selaras dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah saat ini didukung oleh banyak niat baik dari internal dan eksternal, termasuk dukungan masyarakat memiliki sistem pengelolaan

pemerintahan yang efektif, jelas, dan dapat dipercaya. Pemerintah Daerah digunakan sebagai landasan untuk berbagai inisiatif reformasi di dalam organisasi pada umumnya menyediakan tata kelola pemerintahan yang baik. Respon terhadap kesadaran ini didasari oleh keinginan masyarakat umum untuk mendapatkan layanan publik dengan kualitas terbaik dan memiliki seperangkat standar untuk mengurangi kecelakaan di tempat kerja.

Kinerja saat ini menjadi salah satu kriteria yang paling sering digunakan di berbagai organisasi, termasuk bisnis, lembaga pemerintah, dan bahkan perguruan tinggi. Selain itu, kinerja juga sering dikaitkan dengan aspek sosial ekonomi masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya lembaga yang memakai istilah “kinerja” Fakta bahwa istilah ini digunakan oleh beberapa organisasi. Pencapaian kinerja tidak hanya diantisipasi dari pegawai yang mampu meningkatkan kinerja kelembagaan, melainkan dalam jangka panjang. (Mangkunegara, 2021).

Pada tanggal 27 Agustus 2024, Pemerintah Kabupaten Gresik melanjutkan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi daerah dengan menerapkan dalam Penghargaan Performa Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2024 se-Jawa Timur, terdapat dua kategori untuk Pengawas Penyaluran Dana Desa. Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Kanwil DJP Jawa Timur. (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dan secara diam-diam ditangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, namun sesuatu yang terjadi pada kinerja pemerintah daerah Gresik di ukur berdasarkan Perbup Gresik No. 37 Tahun 2017 indikator kinerja pemerintah Gresik yaitu perencanaan jangka panjang untuk mendukung Pemerintah Daerah, perencanaan strategis bagi Perangkat Daerah di konteks Pemerintah Daerah, perencanaan tahunan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, penataan dokumen perjanjian kinerja pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, pengarsipan dokumen anggaran Perangkat Daerah, kinerja kerja pemerintah dan Perangkat Daerah, serta pemeliharaan dan peningkatan perfoma program dan kegiatan Perangkat Daerah yaitu belum tercapainya indikator kinerja pemerintah daerah yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja pemerintah Kabupaten Gresik.

Salah satu hal yang memengaruhi kemampuan pemerintah di suatu wilayah adalah sistem pengelolaan keuangan daerah (Rohman, 2020). Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007, Keuangan daerah tersebut berupa penyempurnaan dari regulasi dari

Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 mengenai Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: Perencanaan, implementasi, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah contoh kegiatan yang disebut sebagai “pengelolaan keuangan daerah.” Sejalan dengan penelitian terdahulu (Mulyanto, Nita, 2020) dengan hasil penelitian partisipasi anggaran dan Sistem akuntansi keuangan daerah memperoleh dampak menguntungkan dan relevan dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintahan di daerah, sedangkan penelitian (Sitti, 2022) Sistem akuntansi keuangan daerah ini menguasai efek yang substansial dan merugikan pada pekerjaan pemerintah negara tersebut.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa pekerjaan pemerintah di suatu daerah dapat berjalan dengan lancar dan efektif adalah dengan menerapkan sistem manajemen, yang juga dikenal sebagai sistem pengendalian internal. Pengendalian intern memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis independen atas tugas dan fungsi dari lembaga pemerintah. Karena hal tersebut, sangat penting untuk menerapkan sistem pengembangan internal dalam pekerjaan instansi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya. (Levany Y, 2021). Sejalan dengan penelitian (Puspita Sari, A.Dahri Adi Patra, 2020) yang menegaskan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengawasan internal berdampak produktif dan substansial terhadap kinerja pemerintah daerah, akan tetapi dalam kajian (Mulya dan Fadli, 2024) pengendalian intern memiliki dampak negatif dan penting berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah.

Faktor lain yang mungkin berpotensi merugikan pada efektivitas pemerintah mencakup sistem akuntansi keuangan daerah (Zulhendri, 2021). Sistem akuntansi keuangan, hal ini memungkinkan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah bekerja sebagai sarana mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan pekerjaan dapat dikelola, sehingga diwajibkan sistem akuntansi yang kuat, lantaran sistem akuntansi keuangan dianggap sebagai komponen kunci dari munculnya keuangan daerah yang adil, optimal, jelas, dan rasional. Sejalan dengan penelitian Alyn dan (Tutri, 2022) yang menunjukkan implementasi sistem akuntansi berpengaruh positif dan signifikan. Namun, terkait dengan pekerjaan pemerintah daerah, dalam penelitian ini (Hayunda, 2022) hal ini mengindikasikan menurut penerapan sistem akuntansi keuangan negara memiliki dampak yang signifikan dan negatif mengenai kinerja

pemerintah negara tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian tersebut, tujuannya adalah untuk;

1. Dengan tujuan mengenali aspek sistem pengelolaan keuangan daerah (X1) perihal kinerja pemerintah daerah (Y).
2. Sebagai cara mengenali efek yang ditimbulkan pada aspek pengendalian internal (X2) mengenai kinerja pemerintah daerah (Y).
3. Agar memahami dampak dari aspek implementasi sistem akuntansi pemerintah (X3) seputar kinerja pemerintah daerah (Y).

Implikasi dari hasil riset ini adalah pemerintah dapat menggunakan temuan-temuannya untuk meningkatkan efisiensi operasi pemerintah di wilayah tersebut. Dalam waktu yang sama, bagi para pengkaji dan peneliti, studi ini memberikan kontribusi signifikan pada pengayaan literatur terkait faktor-faktor yang memiliki dampak terhadap kinerja pemerintah, serta menyediakan peluang untuk eksplorasi lebih dalam di sektor ini.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Keagensi

Menurut teori keagenan adalah interaksi terbentuk ketika satu orang (agent) setuju untuk menyelaraskan diri melalui hasil yang diinginkan dari organisasi lain (*principal*). (Dale H Schunk, 2022), menyatakan bahwa ketika prinsipal mengalihkan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen, maka akan muncul dilema keagenan. Hubungan antara legislator sebagai agen publik sebagai agen utama, (Abdul Halim, 2022) terdapat bukti bahwa hubungan agen-pemilih-legislatif dalam pengertian ini menjelaskan bagaimana masyarakat umum memiliki hak untuk membentuk opini tentang kepentingan mereka sendiri dan kemudian menyediakan uang untuk membiayai transportasi mereka sendiri. Pihak yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang pengaturan belanja dalam APBD, secara umum, dapat mengindikasikan preferensi prinsipal atau pemilik. Oleh karena itu, pejabat sebagai akan selalu memiliki kebutuhan yang sama dengan masyarakat umum.

### Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah mengandung berbagai elemen yang krusial, tidak hanya bagi publik dalam arti luas dan bagi para kontributor dana, dan juga untuk pemerintah daerah secara keseluruhan. Namun, DPRD yang memiliki tanggung jawab

fungsional, lebih penting daripada dalam pelaksanaan kegiatan legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurut Peraturan Bupati Gresik No. 37 tahun 2017, indikator utama produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan strategis perangkat daerah dalam konteks Pemerintah Daerah;
- c. Perencanaan tahunan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintahan Daerah;
- e. Komposisi dokumen anggaran Perangkat Daerah;
- f. Pelaporan performa pemerintah daerah dan rincian Perangkat Daerah; dan
- g. Pemeliharaan dan peningkatan proses kerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

#### **Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah**

PP Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 6, menyatakan bahwa definisi manajemen keuangan daerah adalah monitoring, proyeksi, realization, administrasi, reportase, dan pertanggungjawaban finansial daerah termasuk sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang komprehensif. (Chabib Soleh, 2021:05), Di antara pengelolaan keuangan yang esensial untuk mengatur kebijakan di wilayah keuangan tertentu adalah:

- a. Akuntabilitas
- b. *Value for money*
- c. Tujuan menganalisis keuangan publik
- d. Transparansi
- e. Pengendalian

Prosedur yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing instansi untuk dirancang dan diimplementasikan. Agar informasi dapat diandalkan dan dibandingkan, penyajiannya harus mengikuti standar akuntansi. Langkah ini dilakukan agar laporan keuangan yang dihasilkan valid, sesuai standar dan memberikan informasi yang berharga bagi para pemangku kepentingan yang berkepentingan (Erni et al, 2018 dalam Aprisyah & Yuliati, 2021:5). Sejalan dengan riset (Irvan Saefulloh, 2022) dengan temuan studi hal ini mengindikasikan adanya korelasi positif antara efisiensi pemerintah daerah dengan sistem anggaran dan

akuntansi keuangan.

### **Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal yang relevan secara akurat memprediksi adanya kesalahan dan penyelewengan dalam konteks yang layak; jika peristiwa ini benar-benar terjadi, maka akan dapat diidentifikasi dengan cepat (Levany Y, 2021). Usaha-usaha pimpinan perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen internal yang efektif dengan tujuan agar organisasi lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Secara umum, bentuk-bentuk pengendalian dapat dianalisis dan dievaluasi membandingkan manfaat yang diantisipasi dengan biaya aktual.

Hasil penelitian (Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari, 2020), meneliti keterkaitan pengawasan internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah. Studi mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara pengawasan internal dan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini merujuk berkaitan dengan pengawasan internal yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan berpengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, dimana integrasi dalam sistem akuntansi keuangan daerah sudah diimplementasikan secara efisien sesuai dengan prinsip tersebut akan menimbulkan efek buruk pada.

### **Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah**

Menurut (Abdul Halim, 2022) definisi Akuntansi Keuangan daerah adalah identifikasi, koreksi, klarifikasi, dan dokumentasi transaksi finansial dari entitas pemerintah daerah yang digunakan sebagai informasi untuk evaluasi ekonomi oleh pihak eksternal. Menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terdiri dari:

- a. Pengarsipan
- b. Klasifikasi dan sintesis
- c. Peliputan

Sejalan dengan penelitian (Abdul Rohman, 2020) terkait dampak penerapan sistem akuntansi, hubungan antara pengelolaan keuangan dan fungsi pemerintah, dan pekerjaan pemerintah daerah. Riset mengungkapkan sehingga penerapan sistem akuntansi pemerintah dan keuangan negara memiliki dampak pada fungsi intern.

Mengacu pada pemahaman terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam riset

ini. Maka dibentuklah hipotesis pada penelitian, hal ini sebagaimana yang dijelaskan:

H1: Sistem pengelolaan keuangan berdampak pada kinerja pemerintah daerah.

H2: Pengendalian internal berperan dalam hal kinerja pemerintah daerah.

H3: Implementasi sistem akuntansi pemerintah memengaruhi terkait dengan kinerja pemerintah daerah.

### METODE PENELITIAN

Model analisis regresi berganda diterapkan dalam metode riset ini. Statistik yang diterapkan dalam studi ini adalah data runtut waktu (*time series*) tahun 2024 serta dievaluasi dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil analisis model regresi diamsumsikan valid setelah lulus uji asumsi klasik. Prosedur pengumpulan data mencakup dokumen otorisasi, laporan administratif, jurnal akademik, dan literatur.

#### Teknis Analisis Data

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

X<sub>1</sub> = Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

X<sub>2</sub> = Pengendalian Internal

X<sub>3</sub> = Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah

β<sub>0</sub> = Konstanta

β<sub>1</sub> = Koefisien regresi

### HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Aspirasi penelitian ini adalah guna menganalisis keterkaitan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengembangan Internal, dan implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode analisis garis regresi.

$$Y = 3,329 + 0,299X_1 + 0,177X_2 + 0,504X_3 + e$$

#### Uji t-Statistik

Uji t-statistik, dalam maksud guna untuk menentukan relevansi setiap angka pengganda variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dengan merujuk pada output pengujian t-statistik:

- Variabel X<sub>1</sub> yakni sistem pengelolaan keuangan daerah signifikan mempengaruhi variabel Y yakni kinerja pemerintah daerah dengan parameter p-value 0,014 yang kurang dari 0,050

- Variabel X2 yakni pengendalian internal memberikan pengaruh yang berarti variabel Y yakni kinerja pemerintah daerah dengan memiliki parameter p-value 0,042 yang lebih signifikan dari 0,050
- Variabel X3 yakni kuantitas implementasi sistem akuntansi pemerintah mendasar mempengaruhi variabel Y yakni kinerja pemerintah daerah memiliki nilai p-value 0,000 yang lebih kecil dari 0,050

### **Uji Koefisien Determinasi**

Fungsi dari uji koefisien determinasi (R-squared) yaitu menyoroti beberapa model regresi yang baik yang menjelaskan variabel-variabel dalam aspek variabel dependen (Y) yang terjadi akibat variabel-variabel independen. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa nilai R-squared sebesar 0,587. Misalnya, sistem akuntansi pemerintahan, analisis internal, dan sistem keuangan daerah merupakan contoh variabel independen dapat mendeskripsikan variabel dependen, yaitu kinerja pemerintah daerah, yaitu sebesar 58,7%, sedangkan variabel-variabel diluar model penelitian memiliki dampak sekitar 41,3%.

### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik mengacu pada informasi numerik yang esensial dikerat ketika menganalisis regresi berganda dalam rangka untuk mengonfirmasi sehingga model regresi yang digunakan meminimalkan kriteria utama analisis. Berikut ini merupakan kumpulan contoh asumsi klasik yang diterapkan.

### **Uji Normalitas**

Sasaran fundamental dari uji normalitas dengan tujuan membandingkan apakah hasil sisa atau kesalahan di area konteks analisis regresi mengikuti pola distribusi normal. Berdasarkan hasil diatas, teridentifikasi nilai signifikansi sebesar 0,974 mengindikasikan bahwa data mengikuti distribusi normal terkait dengan nilai yang lebih besar dari 0,05.

### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dengan maksud supaya mengidentifikasi bagaimana terdapat disparitas dalam simpangan baku residual pada model regresi. Mengacu pada hasil riset berpotensi ditarik kesimpulan bahwa parameter-parameter signifikan sebesar 0,563 (X1), 0,300 (X2), 0,409 (X3) nilai yang nilai lebih dari 0,05 mengindikasikan bahwa tidak ada indikasi adanya heteroskedastisitas.

### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas merupakan teknik angka statistik yang dirancang dengan tujuan mengidentifikasi ditemukan relasi nonlinier yang berkekuatan antara variabel-variabel independen mengenai sebuah model regresi. Dari pengujian, terungkap karena VIF dari semua variabel mendekati 10 dan toleransi mendekati apabila hasilnya 0,1, sehingga dapat diungkapkan bahwa tidak ada masalah yang berkaitan dengan multikolinearitas.

### **Uji Instrumen**

Uji instrumen bertujuan untuk mengevaluasi keandalan alat ukur yang digunakan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi valid dan reliabel karena instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data mempunyai kualitas validitas dan reliabilitas yang memadai.

### **Uji Validitas**

Sebuah angket dapat dikategorikan sebagai efektif apabila nilai  $r$  hitung lebih dominan dalam perbandingan dengan  $r$  tabel dalam skala signifikansi 0,05; kontras dengan, ketika nilai  $r$  hitung tidak mencapai  $r$  tabel, angket tersebut dianggap kurang akurat. Semua indikator variabel hasil dianggap handal apabila  $r$  hitung semakin dominan dari  $r$  tabel dan nilai sig di bawah 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ), menandakan bahwasannya data yang dikumpulkan peneliti memiliki akurasi yang mencerminkan keadaan objek secara nyata.

### **Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas memperlihatkan bahwa instrumen tersebut konstan jika diperuntukkan untuk mengurangi gejala yang sama di lokasi lain, Uji reliabilitas pada penelitian ini adalah jika alpha berada lebih tinggi dari 0,70, dari sini berpotensi dinyatakan mengenai alat investigasi yang diterapkan memiliki aspek yang perlu dikritik.

### **Diskusi**

#### **Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah**

#### **Daerah**

Mengindikasikan bahwa sistem keuangan negara berimplikasi konstruktif dan relevan terhadap kinerja pemerintah. Dengan kata lain, apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan cara produktif, maka kinerja pemerintah akan menunjukkan kemajuan. Hal ini selaras dengan penelitian yang ada (Irvan Saefulloh, 2022) yang

mengindikasikan bahwa terlihat aspek positif antara partisipasi anggaran dan sistem pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah.

### **Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil regresi memberikan gambaran bahwa penelitian internal memiliki dampak positif dan signifikan sehubungan dengan kinerja pemerintah daerah. Misalnya, ketika pengendalian internal berhasil, maka kinerja pemerintah juga kian berkembang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari, 2020), menyampaikan bahwa pengawasan internal yang dilakukan secara optimal dan konsisten akan menimbulkan efek pada kinerja pemerintah daerah yang diterapkan akan lebih menguntungkan.

### **Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Temuan kajian menegaskan sehingga penerapan sistem akuntansi pemerintah memiliki dampak positif dan substansial berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. Dengan kata lain, jika sistem akuntansi pemerintah berhasil, maka kinerja pemerintah akan mengalami meningkat. Poin ini juga sesuai dengan temuan yang diungkapkan dalam penelitian (Abdul Rohman, 2020) yang mencerminkan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan yang baik dominan terhadap kinerja pemerintah daerah.

## **KESIMPULAN**

Dengan merujuk pada hasil analisis dan hasil diskusi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal, dan implementasi sistem akuntansi pemerintah memiliki pengaruh signifikan dalam kaitannya sehubungan dengan kinerja pemerintah daerah. Kondisi ini menandai fakta dimana sistem pengelolaan keuangan daerah lebih efektif. Berpeluang meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Semakin baik pengendalian internal, maka hal itu dapat membantu mencegah kesalahan dan penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa semua proses keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada sistem akuntansi pemerintah yang lebih baik juga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan meningkatkan kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah yang efektif merupakan fondasi bagi pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan efisiensi kinerja pemerintah daerah.

Saran dari penelitian ini yaitu pemerintah daerah perlu menginvestasikan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya intelektual, khususnya dalam sektor pengembangan akuntansi dan pengendalian internal. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam mengelola keuangan daerah secara efektif. Membangun dan memperkuat mekanisme pengawasan internal yang efektif juga untuk memastikan semua proses pengelolaan keuangan dilaksanakan Selaras dengan regulasi dan pedoman yang berlaku. Dan perlu adanya peningkatan kinerja di setiap tahun melalui program monitoring kinerja, evaluasi kerja, dan perbaikan kinerja disetiap tahunnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2022). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansin Keuangan Daerah*. Salemba Empat.  
[https://www.academia.edu/76375145/Akuntansi\\_Sektor\\_Publik\\_Akuntansi\\_Keuangan\\_Daerah](https://www.academia.edu/76375145/Akuntansi_Sektor_Publik_Akuntansi_Keuangan_Daerah)
- Abdul Rohman. (2020). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 9.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20961/jab.v9i1.87>
- Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *Jimea*, Vol. 5(No. 2), 1855–1869. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v5i2.1409>
- Chabib Soleh. (2021). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokus Media.
- Dale H Schunk, B. J. Z. (2022). *Motivation and Self-Regulated. Learning: Theory, Research and Applications*. Routledge.  
<https://books.google.co.id/books?id=8VCLdg2DmoQC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Irvan Saefulloh. (2022). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (survey pada Dinas Pemerintah Kabupaten Subang). *Jurnal Akuntansi*, 3.  
<http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/24481>
- Levany Y. (2021). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Power Book.  
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61220/1/21\\_BukuReferensiSistemPengendalianManajemen.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61220/1/21_BukuReferensiSistemPengendalianManajemen.pdf)
- Mangkunegara, A. P. (2021). *Manajemen Kinerja*. Rajawali Press.  
<https://library.unmas.ac.id/repository/EBK-00070.pdf>
- Mulyanto, Nita, A. B. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variab. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 6.
- Puspita Sari, A. Dahri Adi Patra, I. U. (2020). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BLUD RSUD AWERIGADING KOTA PALOPO. *Jurnal Akuntansi*, 1.

[http://repository.umpalopo.ac.id/1030/1/JURNAL\\_PUSPITA\\_SARI.pdf](http://repository.umpalopo.ac.id/1030/1/JURNAL_PUSPITA_SARI.pdf)  
Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari. (2020). Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisaksi*, 7.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>  
Zulhendri. (2021). *Sistem Akuntansi Daerah*. Salemba Empat.

## GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Sig	Keterangan
Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	X1.1	0,417	0,2441	0,000	Valid
	X1.2	0,378	0,2441	0,000	Valid
	X1.3	0,574	0,2441	0,000	Valid
	X1.4	0,747	0,2441	0,000	Valid
Pengendalian Intern (X2)	X2.1	0,704	0,2441	0,000	Valid
	X2.2	0,786	0,2441	0,000	Valid
	X2.3	0,770	0,2441	0,000	Valid
	X2.4	0,639	0,2441	0,000	Valid
	X2.5	0,516	0,2441	0,000	Valid
Implementasi SAP (X3)	X3.1	0,816	0,2441	0,000	Valid
	X3.2	0,723	0,2441	0,000	Valid
	X3.3	0,536	0,2441	0,000	Valid
	X3.4	0,850	0,2441	0,000	Valid
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Y1	0,690	0,2441	0,000	Valid
	Y2	0,605	0,2441	0,000	Valid
	Y3	0,826	0,2441	0,000	Valid
	Y4	0,656	0,2441	0,000	Valid
	Y5	0,669	0,2441	0,000	Valid

Sumber: Output SPSS 16 (2025)

Tabel 2. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach	Alpha	Keterangan
1	Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	0,722	0,70	Reliabel
2	Pengendalian Intern (X2)	0,707	0,70	Reliabel
3	Implementasi SAP (X3)	0,712	0,70	Reliabel
4	Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,728	0,70	Reliabel

Sumber: Output SPSS 16 (2025)

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.40598778
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.047
Kolmogorov-Smirnov Z		.482
Asymp. Sig. (2-tailed)		.974
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Output SPSS 16 (2025)

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.329	2.008		1.658	.103		
	X1	.299	.119	.265	2.518	.014	.609	1.641
	X2	.177	.085	.200	2.082	.042	.735	1.360
	X3	.540	.106	.483	5.072	.000	.745	1.342
a. Dependent Variable: Y								

Sumber: *Output SPSS 16 (2025)*

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.703	1.117		3.314	.002
	X1	-.038	.066	-.091	-.581	.563
	X2	-.049	.047	-.150	-1.046	.300
	X3	-.049	.059	-.118	-.832	.409
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Sumber: *Output SPSS 16 (2025)*

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda Dan Uji T

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.329	2.008		1.658	.103
	X1	.299	.119	.265	2.518	.014
	X2	.177	.085	.200	2.082	.042
	X3	.540	.106	.483	5.072	.000
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: *Output SPSS 16 (2025)*

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.766 <sup>a</sup>	.587	.567	1.440
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1				

Sumber: *Output SPSS 16 (2025)*